

LKjIP

2021

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**



• Profesional • Responsif • Integritas • Mandiri • Akuntabel



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 7 Tangerang

www.pn-tangerang.go.id



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Telp. (021) 5524157, Fax. (021) 5524158

Email : pn.tangerang@gmail.com Website : www.pn-tangerang.go.id

Tangerang, 21 Februari 2022

Nomor : W29.U4/06 /PTIP/II/2022

Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Kepada Yth :

Bapak Ketua

Pengadilan Tinggi Banten

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka bersama ini kami sampaikan Dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* sebanyak 1 (satu) bundel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG



H. MINANCOER RACHMAN, SH, MH
NIP. 196606011992121001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2021. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang terdiri 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2021.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang.

Tangerang, 21 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

H. MINANOER RACHMAN, SH., MH.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 19 (sembilan belas) indikatornya.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 semuanya dapat dilaksanakan dengan baik (*dilihat dari rata-rata capaian 100% atau lebih*), yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2021 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021 disajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.34%	78.66%	97.90%
		1. Pidana Biasa	82.08%	95.00%	115.0%
		2. Pidana Anak	73.74%	77.26%	104.7%
		3. Perdata			
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Banding : -Pidana Biasa	97.33%	94.43%	97.02%
		-Pidana Anak	97.33%	97.36%	100.0%
		- Perdata	97.33%	81.13%	83.35%
		2. Kasasi : - Pidana Biasa	98.67%	96.20%	97.49%
		- Pidana Anak	98.67%	13.15%	13.32%
		- Perdata	98.67%	97.34%	100.6%
3. PK : - Pidana Biasa	99.79%	99.47%	99.67%		
- Pidana Anak	99.79%	81.57%	81.74%		
- Perdata	99.79%	89.10%	89.28%		

	d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	7.14%	7.89%	110.5%
	e.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89.67%	91.86%	102.4%
	f.	Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 1					94,05%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu		
		-	Pidana Biasa	100%	93.76%
		-	Pidana Anak	100%	97.29%
		-	Perdata	100%	100%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5.87%	5.37%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.		
		-	Pidana Biasa	38.69%	67.47%
		-	Pidana Anak	66.66%	100.0%
		-	Perdata	37.89%	81.96%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil	Nihil
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 2					115,31%
3.	Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		b.	Persentase perkar yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbankum)	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	15.91%	2.03%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 4					12,75%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a.	Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%
		b.	Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5					100%
6.	Meningkatnya hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a.	Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 6					100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a.	Nilai IKPA DIPA 01	92.15%	93.50%
		b.	Nilai IKPA DIPA 03	98.40%	90.66%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 7					96,76%
8.	Meningkatnya pengelolaan aset		Presentase Realisasi Output Pengadaan BMN	100%	99.21%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 8					100%
Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang					89,76%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 95.61% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 90.94% untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	31
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	62
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan Umum.....	73
B. Hambatan / Masalah.....	74
C. Rekomendasi.....	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2021

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2021

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama

Lampiran 5 Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang.

Lampiran 6. SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021.....	ii
Tabel 2. Presentase perbandingan sisa perkara yang diselesaikan	4
Tabel 3. Presentase perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu	4
Tabel 4. Presentase perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	5
Tabel 5. Presentase perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5
Tabel 6. Presentase perbandingan index responden pencari keadilan yang puas pada layanan.	5
Tabel 7. Perbandingan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	6
Tabel 8. Presentase Perbandingan putusan perkara yang menarik perhatian	6
Tabel 9. Potensi dan Permasalahan.....	8
Tabel 10 Hubungan tujuan, sasaran strategis dan IKU	13
Tabel 11. Sasaran strategis	15
Tabel 12. Matriks Renstra PN Tangerang tahun 2021	18
Tabel 13. Matrik Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021.	25
Tabel 14. Perjanjian Kinerja tahun 2021 PN Tangerang.....	29
Tabel 15. Hasil pengukuran capaian kinerja.....	31
Tabel 16. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	33
Tabel 17. Presentase sisa perkara yang diselesaikan.....	34
Tabel 18. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	35
Tabel 19. Keadaan perkara pidana	36
Tabel 20. Perbandingan perkara pidana biasa yang diselesaikan.	37
Tabel 21. Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	37
Tabel 22. Upaya hukum perkara pidana yang putus.....	38
Tabel 23. Upaya hukum perkara pidana anak yang putus.....	39
Tabel 24. Upaya hukum perkara perdata yang putus	40
Tabel 25. Capaian Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	42
Tabel 26. Sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	43
Tabel 27. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	44
Tabel 28. Jumlah Tenaga Teknis yang lulus diklat/Bimtek	57
Tabel 29. Jumlah tenaga non teknis yang lulus diklat/Bimtek	58
Tabel 30. Presentase IKPA Dipa 01	60
Tabel 31. Presentase IKPA Dipa 03	61
Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Belanja Dipa 01 Tahun 2021	63
Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dipa 01.....	64
Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dipa 01.....	65
Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dipa 01.....	65
Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dipa 03.....	66
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2021.....	67

Tabel 38. Realisasi PNBPN BUA Tahun 2021.....	68
Tabel 39. Realisasi PNBPN Badan Peradilan Umum Tahun 2021.....	68
Tabel 40. Presentase realisasi anggaran DIPA 01 dan 03.....	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA 01 BUA tahun 2021	63
Grafik 2. Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA 03 BADILUM tahun 2021	66
Grafik 3. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2021	67
Grafik 4. Realisasi PNBP Badilum tahun anggaran 2021	68
Grafik 5. Perbandingan Penerbitan SPM tahun anggaran 2021.	69



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang	2
Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Tangerang	11



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Tangerang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan:

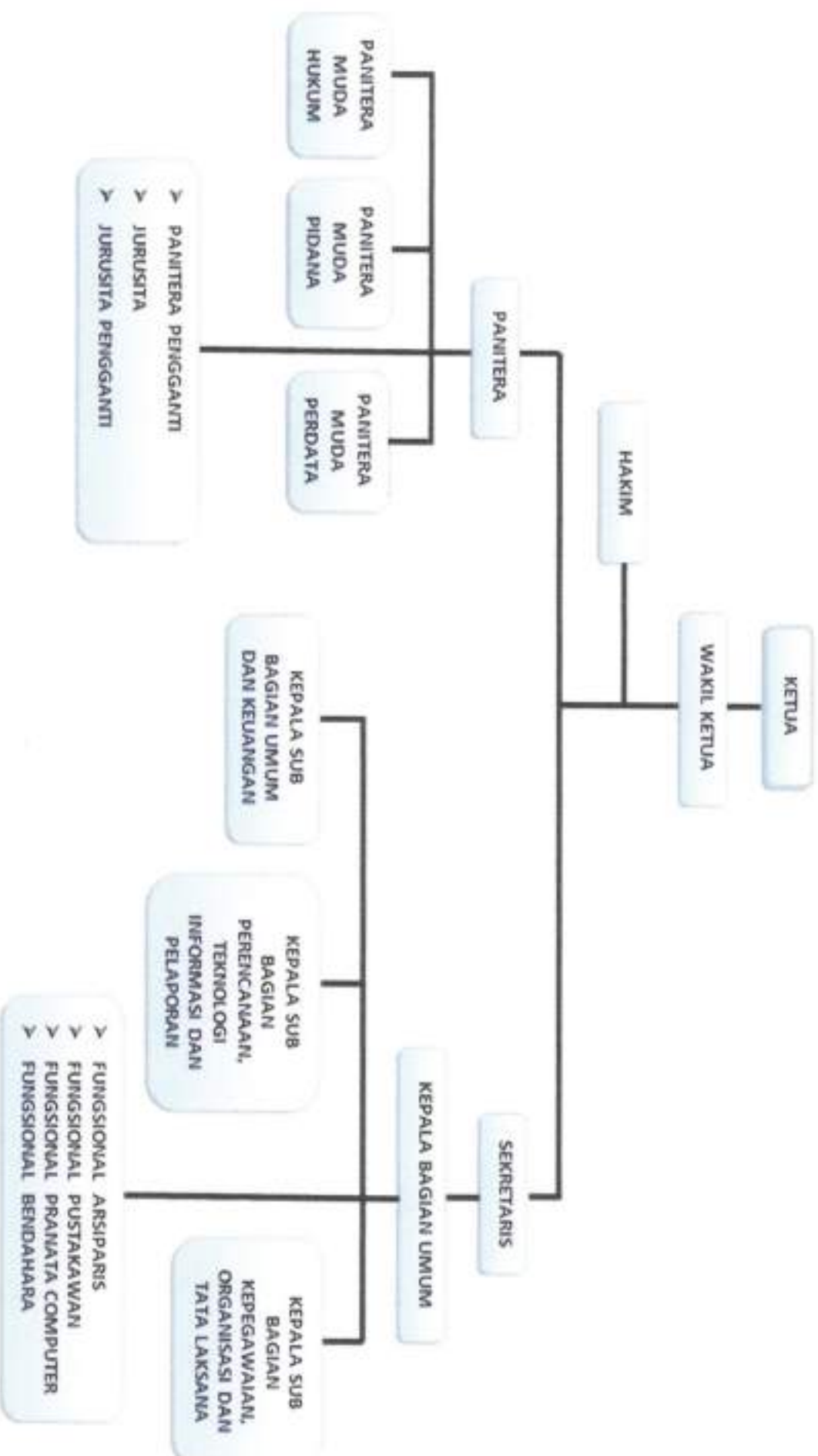
- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Negeri Tangerang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG



Kantor Pengadilan Negeri Tangerang berlantai 6 dengan luas tanah keseluruhan $\pm 4.000 M^2$ dan Luas Bangunan $\pm 6.520 M^2$, + selebihnya untuk halaman Parkir. Pengadilan Negeri Tangerang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 7 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Kode Pos 15118. Pembangunan gedung belakang Pengadilan Negeri Tangerang ditangani oleh kontraktor FA. Chandra Putra yang selesai pada tahun 2015.

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2021, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 146 (Seratus Empat Puluh Enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	23	Aktif
4.	Panitera	1	Aktif
5.	Sekretaris	1	Aktif
6.	Kepala Bagian Umum	1	Aktif
7.	Panitera Muda	3	Aktif
8.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
9.	Panitera Pengganti	38	Aktif
10.	Pranata Keuangan APBN	1	Aktif
11.	Jurusita	4	Aktif
12.	Jurusita Pengganti	20	Aktif
13.	Staf Pelaksana	22	Aktif
14.	Tenaga Honorer	27	Aktif
	JUMLAH	146	Seratus Empat Puluh Enam Orang

Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas sudah sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya berjumlah ± 146 (seratus empat puluh enam) orang untuk Pengadilan Negeri Klas IA Khusus. Akan tetapi sejauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Tingkat Pertama terlaksana dengan baik.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tangerang masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Tangerang.

1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Tabel 2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Jumlah perkara yang ada	Realisasi**	Target	Capaian
2021	Pidana Biasa	531	531	100%	100%	100%
	Pidana Anak	2	2	100%	100%	100%
	Perdata	626	626	100%	100%	100%
2020	Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
	Pidana Anak	10	10	100%	100%	100%
	Perdata	656	656	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	704	704	100%	100%	100%
	Pidana Anaka	20	20	100%	100%	100%
	Perdata	682	682	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Tabel 3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Jumlah perkara yang ada	Realisasi**	Target	Capaian
2021	Pidana Biasa	2083	2648	78.66%	80.34%	97.90%
	Pidana Anak	38	40	95.00%	82.08%	115%
	Perdata	2233	2890	77.26%	73.74%	104.7%
2020	Pidana Biasa	2657	3307	80.34%	77.51%	103.65%
	Pidana Anak	55	67	82.08%	100%	82.08%
	Perdata	2053	2784	73.74%	79.66%	92.56%
2019	Pidana Biasa	2592	3344	77.51%	73.67	105.21%
	Pidana Anaka	54	78	69.23%	100%	69.23%
	Perdata	2503	3142	79.66%	76.43	104.22%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Tabel 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Realisasi **	Target	Capaian
2021	Banding	2920	3250	89.84%	97.33%	92.30%
	Kasasi	3108	3250	95.63%	98.67%	96.91%
	PK	3109	3250	95.66%	99.79%	95.86%
2020	Banding	4638	4765	97.33%	94.05%	103.48%
	Kasasi	4702	4765	98.67%	96.01%	102.92%
	PK	4755	4765	99.79%	98.35%	101.46%
2019	Banding	4792	5095	94.05%	95.63%	98.34%
	Kasasi	4885	5095	96.01%	96.59%	99.25%
	PK	5011	5095	98.35%	98.48%	99.86%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Tabel 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara Diversi	Jumlah perkara diversi yang diselesaikan	Jumlah perkara pidana anak yang ada	Realisasi	Target	Capaian
2021	Pidana anak	3	38	7.89%	7.14%	110.5%
2020	Pidana anak	2	28	7.14%	3.84%	185.93%
2019	Pidana anak	3	78	3.84%	9.80%	39.18%

Tabel 6. Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang Puas pada Layanan Peradilan

Tahun Pelaksanaan Index Responden	Realisasi**	Target	Capaian
2021	91.86%	89.67%	102.4%
2020	89.67%	85.30%	105.12%
2019	85.30%	78.94%	108.05%

2. Aspek Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Tabel 7. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan dalam Tahun Berjalan	Jumlah salinan Putusan yang diterima oleh Pihak	Target	Realisasi	Capaian	
2021	Pidana	2164	2029	100%	93.76%	93.76%

2020	Biasa					
	Pidana Anak Perdata	37	36	100%	97.29%	97.29%
	Pidana Biasa	1483	1483	100%	100%	100%
	Pidana Anak Perdata	3279	3279	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	55	55	100%	100%	100%
	Pidana Anak Perdata	1246	1246	92.08%	100%	108.6%
	Pidana Biasa	2592	2592	96.03%	100%	104.13%
	Pidana Anak Perdata	54	54	100%	100%	100%
		1238	1140	92.31%	92.08%	99.75%

** Perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Tabel 8. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Realisasi**	Target	Capaian
2021	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2020	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2019	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.

3. Aspek Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan pelaksanaan berperkara secara cuma-cuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu guna membantu penguatan identitas hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai

negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT / RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Aspek Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan peradilan, merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Masih banyak aspek lainnya yang terkandung dalam penegakan hukum. Secara implisit pelaksanaan putusan peradilan, menyangkut aspek perdata, pidana, tata negara, lingkungan, dan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering diwarnai berbagai kendala, serta diragukan ada yang bertentangan dengan keadilan, dan supremasi hukum serta adanya kekurangan dalam kelengkapan administrasi peradilan.

Tabel.9. Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, • Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Tangerang, • Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara, • PERMENPAN Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, • Website Pengadilan Negeri Tangerang sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata yang tidak bisa diprediksi setiap tahun, • Informasi Salinan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang yang bisa dilihat oleh publik di direktori putusan, sedangkan diaplikasi SIPP belum dapat diakses oleh publik.
2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisamelakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari.
3. Aspek Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan • Anggaran untuk Layanan Hukum yang masih sangat terbatas.
4. Aspek Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian administrasi peradilan yang masih belum berjalan dengan baik. • Pengawasan terhadap eksekusi hasil putusan yang masih lemah.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

- Bab I Pendahuluan,
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

I. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: *"Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang"*.

Artinya:

1. Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Tangerang;
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Tangerang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut:

2. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Tangerang



A. Tujuan Utama dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tangerang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; dan
- f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan

- d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (access to justice)
- Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
 - Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Tangerang setiap tahun anggaran melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis sebagai dasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan Rencana Kinerja Tahun Anggaran berikutnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/39/SK/KP.10.10/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang

Indikator Kinerja Utama ini dijadikan acuan dalam mengukur Capaian Kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 10. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

			e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencari keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi. Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Perkara banding, kasasi dan PK yang dimohonkan Perbandingan jumlah perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Putusan Perkara yang sudah BHT.

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*)

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

- a) Penyelesaian Pos Bantuan Hukum
- b) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
- c) Penyelesaian Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo)

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

Tabel 11. Sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase penyelesaian sisa perkara
		1) Pidana Biasa
		2) Pidana Anak
		3) Perdata
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
1) Pidana Biasa		
2) Pidana Anak		
3) Perdata		
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.	
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	

		Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	<p>Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.</p> <p>Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. (dieksekusi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<p>Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial</p> <p>Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA Dipa 01
		Nilai IKPA Dipa 03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase Realisasi Output pengadaan BMN

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 12. Matriks Renstra Pengabdian Negeri Tangerang 2020-2024

No	Tipe	Indikator Kinerja	Target Maksimal (%)	Tipe	Tipe					Anggaran	Luasan	Jumlah Dosen	Siswa					
					Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023				2024	Target 2021	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi	90%	Terdapat proses penelitian yang menghasilkan publikasi internasional	1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan	2020	2021	2022	2023	2024	Rp. 2.000.000.000	1000	7000	522.400.000	300.000.000	300.000.000	487.500.000	732.000.000
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
						100	100	100	100	100								
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					2020	2021	2022	2023	2024									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					94,05	97,33	97,49	98,17	98,27									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					96,01	98,67	99,48	99,49	99,54									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					98,35	99,79	97,48	99,51	99,41									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									
1) Jumlah publikasi yang dihasilkan 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah publikasi internasional terakreditasi 4) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan 5) Jumlah publikasi internasional terakreditasi terapan terapan					100	100	100	100	100									

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	300.960.000
		Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu.	78,72%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.	98,59%					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7,14%					
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,67%					
Persentase pelayanan zero complian di PTSP	100%							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	300.960.000
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	47,74%					
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	Nihil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang mendukung peradilan umum	2 Unit	25.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Percentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Di Wilayah Banten	3 PKR	2.760.000
		Percentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%					
		Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Percentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15.91%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	300.960.000

5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Presentase Tenaga Teknis / pegawai yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat/bimtek	33 org	33 org
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadlian	Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Tertaksananya pengawasan kinerja kinerja aparatur pengadilan	1 Lap	1 Laporan
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA DIPA 01 dan 03	95.27%	Program dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	100%	98.10
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Presentase Realisasi output pengadlan BMN	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	100%	265.000.000

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2020 – 2024 (Dokumen terpisah), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. W29.U4/42/SK/KP.10.10/1/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang (Dokumen terpisah).

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	80.34% 82.08% 73.74%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	97.33% 98.67% 99.79%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7.14%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	89.67%
		f. Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5.87%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	47.74%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Nihil
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15.91%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase Tenaga Teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA Dipa 01	92.15%
		b. Nilai IKPA Dipa 03	98.40%
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	a. Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

- Rp. 22.342.673.000,-
- Rp. 575.000.000,-
- Rp. 347.320.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2021 adalah sebesar 89.76%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Banding yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana Biasa	80.34%	78.66%	97.90%
		2. Pidana Anak	82.08%	95.0%	115.0%
		3. Perdata	73.74%	77.26%	104.7%
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Banding	97.33%	89.84%	92.30%
2. Kasasi	98.67%	95.63%	96.91%		
3. PK	99.79%	95.66%	95.86%		
		c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7.14%	7.89%	110.5%
		d. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89.67%	91.86%	102.4%
		e. Presentase pelayanan zero complain di PTSP	100%	100%	100%
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding 94.05 %</i>					

2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke para Pihak Tepat Waktu			
		a. Pidana Biasa	100%	93.76%	93.76%
		b. Pidana Anak	100%	97.29%	97.29%
		c. Perdata	100%	100.0%	100.0%
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5.87%	5.37%	91.48%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	a. Pidana Biasa	38.69%	67.47%	174%	
	b. Pidana Anak	66.66%	100.0%	150%	
	c. Perdata	37.89%	81.96%	216%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 115.31 %</i>					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	NIHIL	NIHIL
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	NIHIL	NIHIL
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (access to justice) 100%</i>					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15.91%	2.03%	12.75%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Kepatuhan 12.75%</i>					
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100%</i>					
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja Aparatur pengadilan	1. Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 100%</i>					
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA Dipa 01	92.15%	93.50	101.4
		2. Nilai IKPA Dipa 03	98.4%	90.66	92.13
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 96.76%</i>					

8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	1. Presentase Realisasi output pengadaan BMN	100%	99.21%	99.21%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 99.21%</i>					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2021 SEBESAR					

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2021 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja		Capaian Th.		
		2021	2020	2019
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
	2. Pidana Anak	100%	100%	100%
	3. Perdata	100%	100%	100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Pidana Biasa	97.90%	103.65%	95.95%
	2. Pidana Anak	115%	96.49%	100%
	3. Perdata	104.7%	92.56%	99.47%
3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	1. Banding	92.30%	85.94%	100.98%
	2. Kasasi	96.91%	85.05%	99.31%
	3. PK	95.86%	72.44%	99.04%
4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		110.5%	185.93%	363.10%
5. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		102.4%	105.12%	119.71%

6. Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	-
Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	94.05%	102.2%	90.75%

Peningkatan ini terutama pada indikator ke-3 yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran I

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
- Indikator kinerja ini untuk menggambarkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2020) yg belum putus dan harus diselesaikan/ diputus ditahun 2021.

Tabel 17. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan							
1. Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat di simpulkan :

- Untuk perkara Pidana Biasa tahun 2020 sisa 531, tahun 2019 sisa 778 perkara tahun 2018 sisa 704 perkara, tahun 2017 sisa 775 perkara, semua bisa di selesaikan/diputus sehingga mencapai target 100%;
- Untuk perkara Pidana Anak tahun 2018 sisa 8 perkara, pada tahun 2019 sisa 20 perkara dan tahun 2020 ada sisa 2 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021.
- Untuk perkara Perdata tahun 2018 sisa 682 perkara, tahun 2017 sisa 609 perkara, dan tahun 2019 sisa 656 serta tahun 2020 ada sisa perkara 626 yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Semua perkara tersebut diselesaikan/diputus sehingga persentase capaiannya 100%;

No.	Jenis Perkara	2018	2019	2020
1.	Pidana Biasa	704	778	531
2.	Pidana Anak	8	20	2
3.	Perdata	682	656	626

Indikator kinerja ke-1 :Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perbandingan antara perkara yang diselesaikan (diputus dan iminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan jumlah perkara yang ada
- Indikator kinerja ini untuk menggambarkan produktivitas proses penyelesaian perkara di tahun berjalan (2021) atau untuk mengukur waktu dalam penyelesaian perkara

Tabel 18. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	
			2021	2020
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
1. Pidana Biasa	80.34%	78.66%	97.90%	103.65%
2. Pidana Anak	82.08%	95.0%	115.0%	100.0%
3. Perdata	73.74%	77.26%	104.7%	92.56%

Dari table diatas dapat di simpulkan :

1) PIDANA BIASA

Pada tahun 2021 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar 97.90%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang diselesaikan sebesar 78.66% dengan target yang ditetapkan sebesar 80.34%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 78.66% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2021 sebesar 2083 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2021 sebesar 2648 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 80.34%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2021, realisasi penyelesaian perkara 78.66%. Artinya realisasi penyelesaian mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 5.75%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2020 (3307 perkara) lebih banyak dari tahun 2021 (2648 perkara), sehingga realisasi penyelesaian perkara 78.66%.

Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2021

Tabel 19. Keadaan Perkara Pidana

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2020)			531
	Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	Januari	142	202	329
2.	Februari	177	186	320
3.	Maret	215	186	349
4.	April	184	194	330
5.	Mei	177	144	372
6.	Juni	172	179	365
7.	Juli	120	153	332
8.	Agustus	215	144	403
9.	September	187	209	381
10.	Oktober	153	158	376
11.	November	165	172	369
12.	Desember	210	156	423
	JUMLAH	2117	2083	

Perbandingan Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 20. Tabel Perbandingan Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

No.	Tahun	Masuk*	Putus	%
1	2017	3174	2437	76.78
2	2018	3524	2596	73.67
3	2019	3344	2592	77.51
4	2020	3307	2657	80.34
5	2021	2117	2083	78.66

*perkara masuk ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, persentase penyelesaian perkara mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit kenaikan yang disebabkan jumlah perkara yang mengalami penurunan dan mengalami persentase penurunan kembali terjadi pada tahun 2017 dan 2021. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah Perkara pidana yang masuk pada tahun 2017 s.d 2021 yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2020 sebanyak 3307 perkara dan diselesaikan sebanyak 2657 perkara (80.34%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 2117 perkara dan diselesaikan sebanyak 2083 perkara (78.66%) berarti adanya penurunan penyelesaian perkara pidana sebesar 1.68% dari tahun 2021.

Namun persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 telah ditargetkan 80.34% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 78.66%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2021 untuk penyelesaian perkara Pidana belum tercapai dengan maksimal.

Sasaran 3

Indikator kinerja ke-3 :Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara
- Indikator kinerja ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan. Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 21 Capaian Sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2021 (%)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1. Pidana Biasa	94.43%	96.37%	96.68%	97.02%	99.67%	99.15%

2. Pidana Anak	97.36%	96.36%	98.14%	100.0%	96.36%	98.14%
2. Perdata	81.13%	94.69%	91.33%	83.35%	103.67%	97.74%

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2021 (%)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi						
1. Pidana Biasa	96.20%	98.30%	97.37%	97.49%	100.95%	99.25%
2. Pidana Anak	13.15%	100%	98.14%	13.32%	100%	98.14%
2. Perdata	97.34%	99.12%	94.32%	100.6%	105.08%	99.49%

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2021 (%)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK						
1. Pidana Biasa	99.47%	99.84%	99.65%	99.67%	100.19%	100%
2. Pidana Anak	81.57%	100%	100%	81.74%	100%	100%
2. Perdata	89.10%	99.70%	97.00%	89.28%	102.78%	98.10%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA BIASA

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2021 adalah sebesar 97.02%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 94.43% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 97.33%

Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 94.43%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 206 perkara, baik itu upaya banding dan kasasi serta PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2021 adalah sebesar 97.02% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Perkara Pidana Biasa yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut data upaya hukum perkara Pidana Biasa yang putus tahun 2019 s.d. 2021:

Tabel 22 data Upaya Hukum Perkara Pidana yang putus

No.	Keterangan Perkara	2021	2020	2019
1.	Putusan yang diajukan banding	116	16	86

2.	Putusan yang tidak diajukan banding	1967	2641	2506
3.	Putusan yang diajukan kasasi	79	45	68
4.	Putusan yang tidak diajukan kasasi	2004	2612	2524
5.	Putusan yang diajukan PK	11	4	9
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	2072	2653	2583

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi persentase perkara Pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2021 adalah sebesar 94,43%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2020 adalah sebesar 99,39%, berarti terdapat penurunan persentase terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 4,96%.

Target kinerja tahun 2021 sebesar 97,33% terealisasi sebesar 94,43%, artinya bahwa kinerja mengalami sedikit penurunan dari target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang hampir memuaskan.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk peningkatan akseptabilitas putusan Hakim perkara pidana mengalami penurunan.

2) PIDANA ANAK

Capaian persentase perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum banding, tahun 2021 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 97,36% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 97,33%. Perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan kasasi adalah sebesar 13,32% dan 81,74%.

Realisasi persentase perkara Pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 97,36%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 38 perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 37 perkara, baik itu upaya banding dan kasasi serta PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2021 adalah sebesar 97,36% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Berikut data upaya hukum perkara Pidana Anak yang putus tahun 2020 s.d. 2021:

Tabel 23. Data upaya hukum perkara pidana anak yang putus

No.	Keterangan Perkara	2020	2021
1.	Putusan yang diajukan banding	2	1
2.	Putusan yang tidak diajukan banding	53	37
3.	Putusan yang diajukan kasasi	0	33

4.	Putusan yang tidak diajukan kasasi	55	5
5.	Putusan yang diajukan PK	0	7
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	55	31

3) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2021 adalah sebesar 83.35%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 81.13% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 97.33%

Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 81.13%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara (perdata gugatan) yang telah diputus sebanyak 1129 perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 366 perkara, baik itu upaya banding, kasasi maupun PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2021 adalah sebesar 83.35% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut data upaya hukum perkara Perdata yang putus tahun 2019 s.d. 2021:

Tabel 24. Data upaya hukum perkara perdata yang putus

No.	Keterangan Perkara	2021	2020	2019
1.	Putusan yang diajukan banding	213	109	217
2.	Putusan tidak diajukan banding	916	2286	2067
3.	Putusan yang diajukan kasasi	30	18	142
4.	Putusan tidak diajukan kasasi	1099	2361	2097
5.	Putusan yang diajukan PK	123	6	75
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	1006	2047	2428

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020 adalah sebesar 94.69%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2019 adalah sebesar 91.33%, berarti terdapat kenaikan persentase terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 3.36%. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 103.67%.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami penurunan.

Sasaran 4

d) Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Pencapaian sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
d.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7.14%	7.89%	110.5%

Sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah sebesar 110.5%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 7.89% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 7.14%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara Pidana Anak yang telah diselesaikan secara Diversi sebanyak 3 perkara berbanding dengan Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2021 sebanyak 38 perkara.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi telah tercapai. Pada tahun 2020 capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi sebesar 185%, sehingga capaian tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 5

e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pencapaian sasaran index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
e.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	89.67%	91.86%	102.4%

Sasaran Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Indikator kinerja ini untuk mengukur Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Capaian persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 adalah sebesar 102.4%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 91.86% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 89.67%. Perhitungan tersebut berdasarkan pada hasil analisis terhadap 9 (Sembilan) ruang lingkup.

Indikator Kinerja	Capaian(%)		
	2021	2020	2019
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102.4%	105.12%	108.05%

Sasaran 6

f) Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pencapaian sasaran pelayanan zero complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
f.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	100%

Capaian persentase pelayanan zero complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pelayanan yang diterima di PTSP tanpa complain terhadap layanan yang diterima di PTSP sebesar 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%.

Tabel 25 Capaian Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP

Bagian	Total Pelayanan yang diterima tahun 2021	Total Pelayanan PTSP tanpa complain
Hukum	7.584	7.584
Perdata	11.247	11.247
Umum	3.165	3.165
Pidana	5.591	5.591



Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, Putusan diterima oleh pihak tepat waktu dan masyarakat dapat mengakses secara online putusan dalam waktu 1 (satu) hari.

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 26. Sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja	Capaian Th		
	2019	2020	2021
a. Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu	127.60%	100.0%	93.76%
1. Pidana biasa	100.00%	100.0%	97.29%
2. Pidana Anak			
3. Perdata	108.41%	108.6%	100.0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	195.45%	85.31%	91.48%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96.61%	75.28%	180%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil	Nihil	Nihil
Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	125.61%	93.83%	115.31%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak Tepat Waktu

- Persentase penyelesaian putusan tepat waktu adalah perbandingan antara

jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah putusan.

- Indikator ini untuk mengukur waktu dalam penyelesaian putusan.

Tabel 27 : Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
			2020	2021
Persentase isi Putusan yang di terima oleh para pihak Tepat Waktu				
1. Pidana Biasa	100%	93.76%	100%	93.76%
2. Pidana Anak	100%	97.29%	100%	97.29%
3. Perdata	100%	100%	108.6%	100.0%

Dari tabel 22 diatas dapat disimpulkan :

1) PIDANA BIASA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 93.76%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 2164 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 2029 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 93.76%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu belum mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2020 (tahun sebelumnya), maka capaian tahun 2020 belum melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

2) PIDANA ANAK

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 97.29%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 37 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 36 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 97.29%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2020 (tahun sebelumnya), maka capaian tahun 2021 telah mengalami penurunan capaian dari target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

3) PERDATA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus (perkara gugatan dan permohonan) sebanyak

1483 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 1483 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-2: Persentase Perkara Yang di selesaikan melalui Mediasi

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5.87%	5.37%	91.48%

Sasaran persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 5.37%. Adapun perincian berkas yang terdaftar mediasi adalah sebanyak 670 perkara dan telah diselesaikan dengan hasil akta perdamaian / putusan mediasi / pencabutan sebanyak 36 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91.48%. adapun tahun 2020 capaian kinerja sebesar 85.31%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sasaran 3

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	 38.69% 66.66% 37.89%	 67.47% 100% 81.96%	 174% 150% 216%

Sasaran persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA BIASA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 67,47%. Perhitungan tersebut berdasarkan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK (akumulasi) telah lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan perkara yang diajukan permohonannya (akumulasi banding, kasasi dan PK).

- Banding
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 116 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 50 perkara.
- Kasasi
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 75 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 11 perkara.
- Peninjauan Kembali
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 75 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 14 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 174%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang cukup berjalan dengan baik.

2) PIDANA ANAK

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK (akumulasi) telah lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan perkara yang diajukan permohonannya (akumulasi banding, kasasi dan PK).

- Banding
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 1 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 1 perkara.
- Kasasi
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 29 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 7 perkara.

- Peninjauan Kembali
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 33 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 11 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 150%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang cukup berjalan dengan baik.

3) PERDATA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 81,96%.

- Banding
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 213 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 160 perkara.
- Kasasi
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 116 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 30 perkara.
- Peninjauan Kembali
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 123 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 24 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 216%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang cukup berjalan dengan baik.

Sasaran 4

Indikator kinerja ke-4: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

- Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus
- Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak perkara yang menarik perhatian masyarakat

Tabel 23. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)		
			2021	2020	2019
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dari tabel 23 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- pada tahun 2021 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah NIHIL, ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara tipikor. Jadi capaian di tahun 2021 adalah Nihil.
- pada tahun 2020 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah NIHIL, ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara tipikor. Jadi capaian di tahun 2020 adalah Nihil.



Sasaran 3: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)	100%	100%	100%

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Sasaran persentase berkas perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon /Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon /Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon /Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT /RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara prodeo yang diajukan sebanyak 0 perkara, setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata dan Bagian Umum Keuangan diketahui bahwa berkas yang telah lengkap, memenuhi syarat dan tepat waktu untuk diproses sebanyak 0 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara prodeo telah dapat diselesaikan sepenuhnya.

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	NIHIL	NIHIL

Sasaran persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan seperti sidang keliling. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Bahwa Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu dalam wilayah Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidangnya.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar NIHIL. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.

c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Sasaran persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang telah dilaksanakan sebanyak 1050 perkara, setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap, memenuhi syarat dan tepat waktu untuk diproses sebanyak 1050 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah dapat diselesaikan sepenuhnya.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15.91%	2.03%	12.75%

Sasaran persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2021 adalah sebesar 2.03%. Adapun perincian data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1375 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa putusan perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 28 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 12.75% sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 149%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.



Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

5. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/ bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		2. Presentase pegawai Yang lulus diklat/bimtek Non teknis	100%	100%	100%

Presentase Tenaga Teknis Yang Lulus Diklat/Bimtek Teknis Yudisial

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator kinerja presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM teknis yang lulus diklat / bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 28 Jumlah Tenaga Teknis yang Lulus diklat/Bimtek

No.	Nama Diklat/Bimtek	Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/PP Peradilan Umum seluruh indonesia	1	1
2.	Pelatihan sertifikasi hakim Lingkungan hidup Angkatan XIV Tahap III secara klasikal	2	2
3.	Pelatihan singkat calon Panitera/calon Panitera Muda Niaga seluruh indonesia	1	1
4.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten	4	4
5.	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan	2	2
6.	Pelatihan sistem peradilan pidana anak ang. LVII	2	2

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah hakim dan pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 12 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 12 orang. Presentasi pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan atau bimtek tersebut di atas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh mentor/narasumber. Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat/bimtek tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan.

Presentase Pegawai Yang Lulus Diklat/Bimtek Non Teknis

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator kinerja presentase pegawai yang lulus diklat non teknis yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus diklat / bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 29. Tenaga Non Teknis yang lulus diklat/Bimtek

No.	Nama Diklat/Bimtek	Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)
1.	Pelatihan End User Training (EUT) SAKIT web full module tahun 2021	5	5
2.	Bimbingan Teknis Keuangan	1	1
3.	Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAK BMN	1	1
4.	Pelatihan Champion meeting court Excellence Training pada Pusdiklat Menpin MARI	1	1
5.	Pelatihan online Basic Booklet Design with Adobe Indesign	1	1
6.	Pelatihan online Basic Infographic design dengan adobe illustrator	2	2
7.	Pelatihan online Basic Video Editing	2	2
8.	Pelatihan Bendahara periode tahun 2021	1	1
9.	Pelatihan Online Pemecahan Masalah praktis bagi CPNS	1	1
10.	Pelatihan Online Membangun pola pikir Berkelanjutan dan kecepatan Pembelajaran bagi CPNS	1	1
11.	Pelatihan online Manajemen aset	2	2
	Pelatihan online Manajemen Laporan Kinerja	1	1
12.	E-Learning Jabatan fungsional Pranata & Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1	1

Ang VIII

13.	Micro learning program Pendidikan Profesional Berkelanjutan Bendahara Negara Tersertifikasi TA 2021	1	1
		Jumlah	21
			21

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 21 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 21 orang. Presentasi pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan atau bimtek tersebut diatas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh mentor/narasumber. Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat/bimtek tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan.



Sasaran 6: Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

6. SASARAN MENINGKATNYA HASIL PENGAWASAN KINERJA APARATUR PENGADILAN

Pencapaian sasaran peningkatan hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Hasil pengawasan kinerja aparatur Pengadilan	Presentase temuan LHP daerah yang ditindak lanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti berbanding dengan laporan hasil pengawasan yang harus diselesaikan.

Jumlah pemeriksaan dari Hakim Pengawas Daerah tahun 2021 sebanyak 1 laporan dan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Hal tersebut dapat dikatakan presentase temuan Laporan Hasil Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan.



Sasaran 7: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

7. SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pencapaian sasaran peningkatan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA DIPA 01	92.15%	93.50%	101.46%
		2. Nilai IKPA DIPA 03	98.40%	90.66%	92.13%

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 01

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan nilai akhir per kinerja berbanding dengan jumlah bobot per kinerja.

Tabel 30. Presentase IKPA Dipa 01

Bulan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
Januari	44	45	97.78
Februari	52	53	98.11
Maret	52	53	95.00
April	86.01	95	90.54
Mei	86.65	95	91.21
Juni	91.38	95	90.38
Juli	92.73	95	97.61
Agustus	93.22	95	97.99
September	93.35	95	97.51
Oktober	89.28	95	93.26
November	90.97	95	95.26
Desember	93.39	95	77.63
Rata-Rata			93.50

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA DIPA 01	92.15%	93.50%	101.4%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika Nilai IKPA Dipa 01 tahun 2021 capaiannya sebesar 93.62% yang artinya hampir mencapai target yang ditetapkan.

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 03

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan nilai akhir per kinerja berbanding dengan jumlah bobot per kinerja.

Tabel 31. Presentase IKPA Dipa 03

Bulan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
Januari	45	45	100.0
Februari	53	53	100.0
Maret	53	53	96.89
April	67.10	75	89.46
Mei	68.98	75	91.98
Juni	69.24	75	92.32
Juli	67.14	75	89.52
Agustus	68.03	75	90.71
September	68.63	75	90.77
Oktober	65.55	75	87.40
November	63.86	75	85.14
Desember	68.45	75	73.83
Rata-Rata			90.66

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika Nilai IKPA Dipa 03 tahun 2021 capaiannya sebesar 92.15% yang artinya hampir mencapai target yang ditetapkan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA DIPA 03	98.4%	90.66%	92.13%



Sasaran 8 : Meningkatnya Pengelolaan Aset

8. SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET

Pencapaian sasaran presentase realisasi output pengadaan BMN pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Presentase capaian
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%	99.2%	99.2%

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang sesuai DIPA mendapatkan anggaran dengan alokasi belanja modal sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Dipa 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Belanja Modal	265.000.000	262.895.000	99.2%

Alokasi belanja modal dengan anggaran Rp. 265.000.000,- tersebut digunakan untuk pembelian laptop bagi kebutuhan Teknologi Informasi pada kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

Presentase capaian kinerja pengelolaan aset sebesar 99.2%. Dengan demikian pengelolaan aset hampir mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

1. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Tangerang mendapatkan total alokasi anggaran Rp. 23.170.665.000,- (*Dua puluh tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh lima Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- Dipa (01) Badan Urusan Administrasi dengan 2 program yaitu :
 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 22.563.345.000,-
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Rp. 265.000.000,-
- Dipa (03) Badan Peradilan Umum dengan 1 program yaitu:

A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Dalam RENSTRA, ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Tangerang.

Anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 22.563.345.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp. 21.686.752.838 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) yang didalamnya terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Belanja
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Belanja Pegawai	18.810.677.000	18.294.598.379	97.26
Belanja Barang	3.752.668.000	3.392.154.459	90.39
Belanja Modal	265.000.000	262.895.000	99.20
Total	22.828.345.000	21.949.647.838	95.61

Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA Badan
urusan Administrasi (01) Tahun 2021



a. **Belanja Pegawai :**

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai dan tunjangan Fungsional PNS. Jumlah belanja pegawai yaitu sebesar Rp 18.810.677.000,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp.18.294.598.379 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*). Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.671.592.000	6.666.588.900	99,9
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.000	90.399	89,5
3	511121	Belanja Tunj. Suami Istri PNS	452.285.000	450.683.392	99,6
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120.875.000	119.786.753	99,0
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	64.750.000	64.750.000	100
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.258.205.000	8.253.585.000	99,9
7	511125	Belanja Tunj. PPH PNS	1.539.749.000	1.296.326.804	84,2
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	310.701.000	308.219.520	99,2
9	511129	Belanja Uang Makan	1.292.280.000	1.083.509.000	83,8
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	100.142.000	51.690.000	51,6
Total Belanja Pegawai			18.810.677.000	18.294.598.379	97,26

b. **Belanja Barang**

Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada tahun anggaran 2021 anggaran untuk belanja yaitu sebesar Rp. 3.752.668.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp 3.392.154.459 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Ratus Lima*

Puluh Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.064.360.000	1.016.739.804	95,5
2	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	6.000.000	5.622.800	93,7
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	84.720.000	84.720.000	100
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	322.862.000	279.347.400	86,5
5	522111	Belanja Langganan Listrik	672.340.000	648.081.182	96,4
6	522112	Belanja Langganan Telepon	9.600.000	1.892.639	19,7
7	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	134.640.000	134.580.400	99,9
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	583.980.000	572.024.000	97,9
9	523121	Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	443.686.000	379.329.734	85,5
10	524111	Belanja perjalanan biasa	50.040.000	30.172.000	60,3
11	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	101.800.000	95.190.000	93,5
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	1.350.000	30
13	521131	Belanja Operasional Covid	35.040.000	34.96.500	99,3
14	521241	Belanja non operasional Covid	8.000.000	6.812.000	85
15	524119	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	-
16	522141	Beban Sewa	229.500.000	100.296.000	43,7
17	522191	Belanja Jasa Lainnya	0	0	-
Total Belanja Barang			3.752.668.000	3.392.154.459	90,39

e. Belanja Modal

Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Untuk tahun anggaran 2021, Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.000.000	262.895.000	99,2
Total Belanja Modal			265.000.000	262.895.000	99,2

B. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

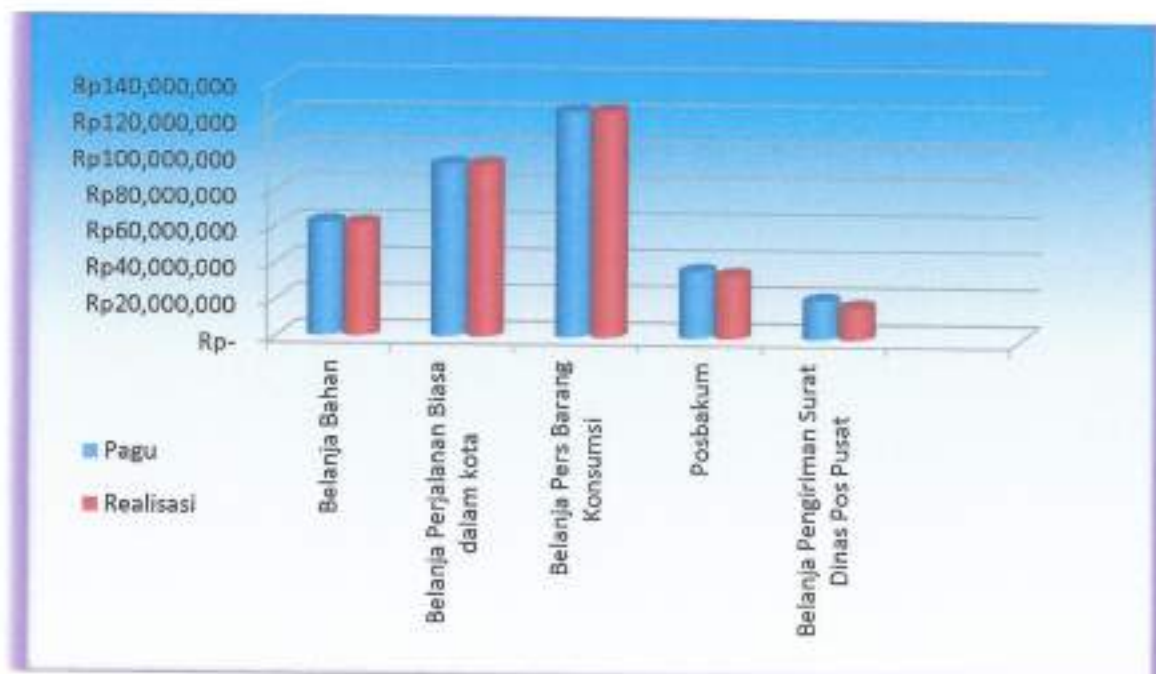
Dalam RENSTRA, ditetapkan program peningkatan manajemen Peradilan Umum yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA(03) Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Tangerang menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 342.320.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2021

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi (Rp)	%
1	521211	Belanja Bahan	61.900.000	61.003.500	98,5
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	94.210.000	94.080.000	99,86
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123.860.000	123.678.000	99,85
4	522131	Posbakum	36.360.000	34.140.000	93,89
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	20.990.000	17.458.400	83,1
Total Belanja Barang			342.320.000	330.359.900	96,51

Grafik 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2021



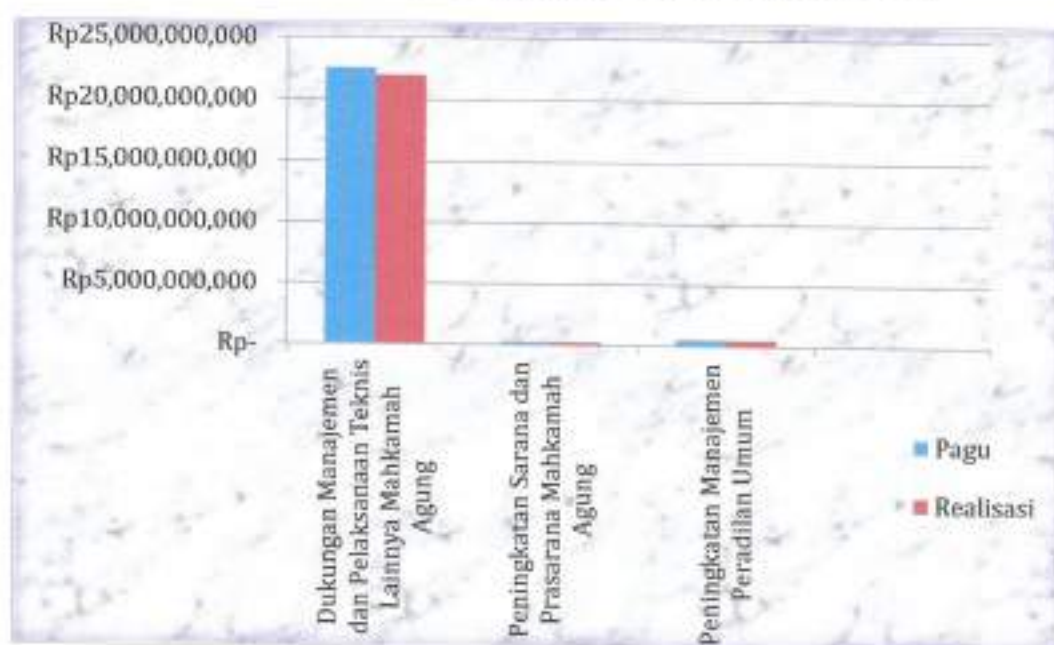
C. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

- DIPA (01) Digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :
 1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 2. (005.01.02) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 37. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

No	Program	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian %
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	22.563.345.000	21.949.647.838	613.697.162	95,61
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	265.000.000	262.895.000	2.105.000	99,2
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	558.760.000	508.158.100	50.601.900	90,94

Grafik 3. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021



2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

➤ Anggaran Badan Urusan Administrasi

Tabel 38. Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2021

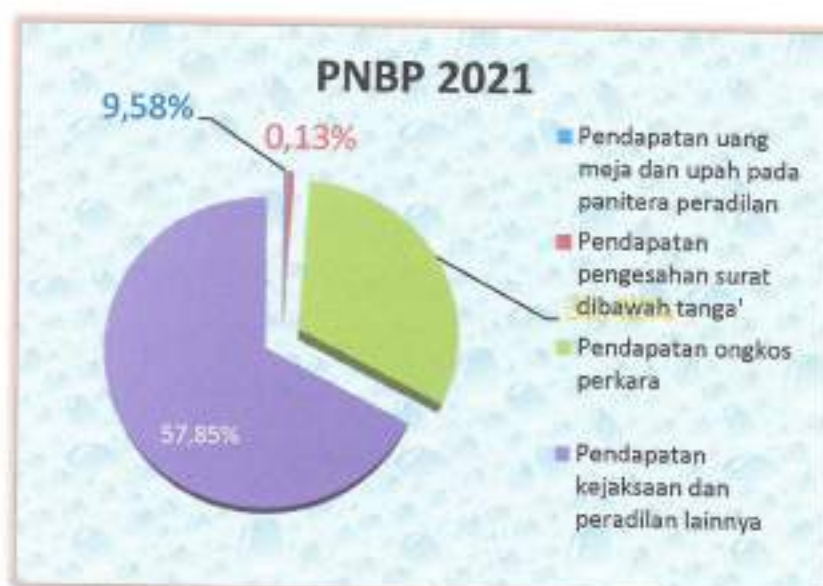
Jenis Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425131	Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	31.983.368
	Total	31.983.368

➤ Anggaran Badan Peradilan Umum

Tabel 39. Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2021

Jenis Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	1.180.000
425232	Pendapatan uang meja dan upah pada panitera badan peradilan	22.880.000
425233	Pendapatan ongkos perkara	102.670.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	218.457.000
	Total	345.187.000

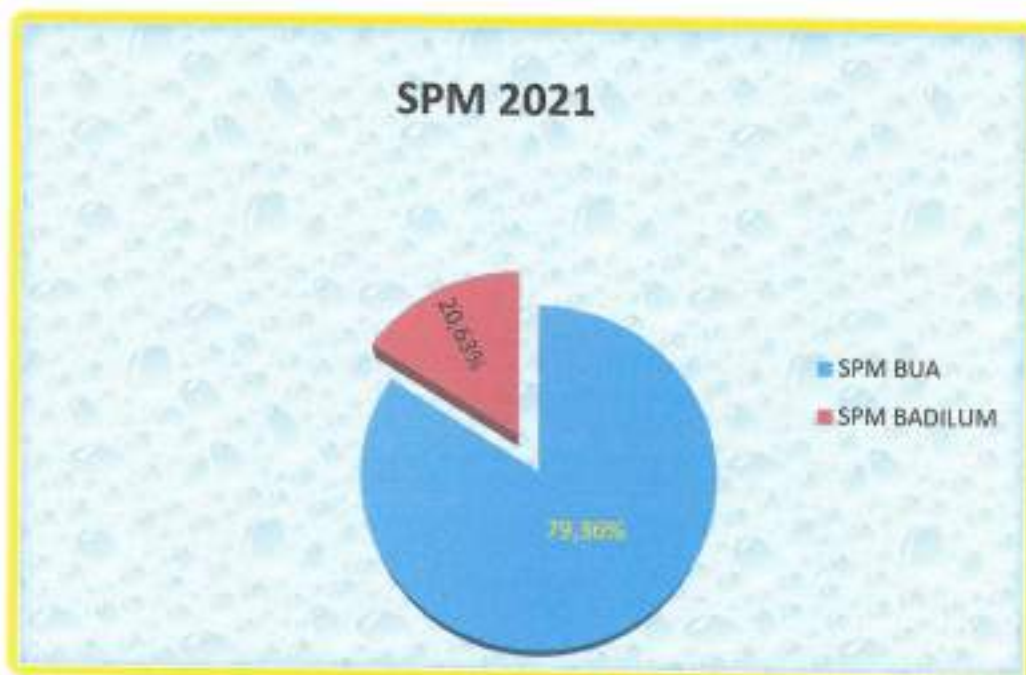
Grafik 4. Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2021



➤ Penerbitan SPM

- Badan Urusan Administrasi : 147 berkas
- Badan Peradilan Umum : 28 berkas

Grafik 5. Perbandingan Penerbitan SPM
Tahun Anggaran 2021



Indikator kinerja yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum dan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung serta Program peningkatan sarana dan prasarana aparatut Mahkamah Agung, target dalam RKT dan PKT, usulan anggaran, anggaran dalam Dipa dan realisasi anggaran diraikan sebagai berikut:

Tabel 40 Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 terhadap RKT dan PKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RNT dan PKT		USULAN ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	
			Target	Rata-Rata					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pidana Biasa ➢ Pidana Anak ➢ Perdata <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pidana Biasa ➢ Pidana Anak ➢ Perdata <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Banding ➢ Kasasi ➢ PK <p>d. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>80,34%</p> <p>82,08%</p> <p>73,74%</p>	643.325.000	300.960.000	296.219.900	98,43%	
				85,73%					
									7,14

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Indeks responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,67%				
	f. Presentase pelayanan zero complain di PTSP	100%				
	a. Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,00%				
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,87%	64,19%	643.325.000	300.960.000	296.219.900
c. Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu						
	- Pidana biasa	38,96%				
	- Pidana Anak	66,66%				
	- Perdata	37,89%				
	d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	NIHIL				

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	2.760.000	540.000	2.220.000	19,56%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (postbankum)	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti	15,91%	82,23%	643.325.000	300.960.000	296.219.900	98,43%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Tenaga Teknis / pegawai yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%					
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%					
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA DIPA 01 dan 03	95,27%					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase Realisasi output pengadaan BMN	100%					

Hal ini menunjukkan, dari target kinerja RKT/PKT secara rata-rata (sebesar 83.03%) dalam program peningkatan manajemen peradilan umum dapat terpenuhi oleh anggaran Dipa 03 karena realisasi anggaran sebesar 95.61% sedangkan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dapat dipenuhi oleh anggaran Dipa 01 karena realisasi anggaran sebesar 90.94%.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur).

Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu pelayanan peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2021 merupakan capaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2021 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan internal. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa Pengadilan Negeri Tangerang.

B. HAMBATAN/ MASALAH

1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian/ unit kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.
2. Kondisi gedung kantor yang kurang memadai sehingga Pengadilan Negeri Tangerang belum mampu untuk menjalankan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara maksimal.
3. Optimalisasi penyerapan anggaran khususnya DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Tangerang belum sepenuhnya dapat direalisasikan mencapai 100%.
4. Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi umum maupun administrasi teknis peradilan.

C. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang maka diperlukan:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan.
5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.
6. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar kantor Pengadilan Negeri Tangerang dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pencari keadilan.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Negeri Tangerang, LKjIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	80.34% 82.08% 73.74%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	97.33% 98.67% 99.79%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7.14%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89.67%
		f. Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%
		2.	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5.87%		
c. Presentase Berkas Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat wakt 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	38.69% 66.66% 37.89%		
d. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15.91%
5.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Presentase tenaga non teknis yang lulus diklat/bimtek	100%
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja apatur pengadilan	Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	92.15%
		b. Nilai IKPA DIPA 03	98.40%
8.	Meningkatnya pengelolaan asset	Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%

No. Kegiatan:

Anggaran :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 22.342.673.000 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. | Rp 575.000.000 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 347.320.000 |

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana Biasa	80.34%	78.66%	97.90%
		2. Pidana Anak	82.08%	95.00%	115.0%
		3. Perdata	73.74%	77.26%	104.7%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Banding : -Pidana Biasa	97.33%	94.43%	97.02%
		- Pidana Anak	97.33%	97.36%	100.0%
		- Perdata	97.33%	81.13%	83.35%
		2. Kasasi - Pidana Biasa	98.67%	96.20%	97.49%
		- Pidana Anak	98.67%	13.15%	13.32%
		- Perdata	98.67%	97.34%	100.6%
3. PK : -Pidana Biasa	99.79%	99.47%	99.67%		
- Pidana Anak	99.79%	81.57%	81.74%		
- Perdata	99.79%	89.10%	89.28%		
d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan secara diversi		7.14%	7.89%	110.5%	
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		89.67%	91.86%	102.4%	
e. Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP		100%	100%	100%	
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 1					94.05%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
		- Pidana Biasa	100%	93.76%	93.76%
		- Pidana Anak	100%	97.29%	97.29%
		- Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5.87%	5.37%	91.48%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.					
- Pidana Biasa	38.69%	67.47%	174%		
- Pidana Anak	66.66%	100.0%	150%		
- Perdata	37.89%	81.96%	216%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		0	0	0	
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 2					115.31%
3.	Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 3					100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)	a. Presentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	15.91%	2.03%	12.75%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 4			12.75%		
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber	a. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 5			100%		
6.	Meningkatnya hasil Pengawasan kinerja Aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 6			100%		
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	92.15%	93.50%	101.4%
		b. Nilai IKPA DIPA 03	98.40%	90.66%	92.13%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 7			96.76%		
8.	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Presentase Realisasi Output Pengadaan BMN	100%	99.21%	99.21%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 8			99.21%		
Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang			89.76%		

3	Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	15.91%	2.07%	2.51%	2.23%	2.03%	13%	15.77%	14.01%	12.75%								
		b. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat/ bimtek non teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		b. Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%	100%							
6	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatut pengadilan	a. Nilai IKPA DIPA 01	92.15%	96.96%	93.83%	93.51%	93.50%	105.2%	101.8%	101.4%	101.4%								
		b. Nilai IKPA DIPA 03	98.40%	98.96%	95.10%	95.12%	90.66%	100.5%	96.64%	96.66%	92.13%								
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Presentase Realisasi Output Penandaan BAKN	100%	0	56.86%	82.05%	99.21%	0	56.86%	82.05%	99.21%								
		b. Presentase Realisasi Output Penandaan BAKN	100%	0	56.86%	82.05%	99.21%	0	56.86%	82.05%	99.21%								
8	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Presentase Realisasi Output Penandaan BAKN	100%	0	56.86%	82.05%	99.21%	0	56.86%	82.05%	99.21%								

Laporan Triwulan I
(Januari – Maret)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan I Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	574	531	100%	92.5%	92.5%
Pidana Anak	2	2	100%	100%	100%
Perdata	576	626	100%	92%	92%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh bagian Kepaniteraan Pidana anak telah mencapai target sedangkan untuk perkara Pidana Biasa dan Perdata hampir mencapai target yakni sebesar 92.5% dan 92%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	574	1065	80.34%	53.89%	67.07%
Pidana Anak	7	9	82.08%	77.77%	94.74%
Perdata	576	1280	73.74%	45%	61.02%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 67.07%, 94.74% dan 61.02% sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

- c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	1084	1157	97.33%	93.69%	96.26%
Kasasi	1151	1157	98.67%	99.48%	100.8%
PK	1127	1157	99.79%	97.40%	97.60%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi dari target yang ditetapkan.

- d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
 Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Anak	1	7	7.14%	14.28%	200%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi telah melebihi target yang ditetapkan.

- e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – Maret 2021 adalah 92.5% sedangkan target yang ditetapkan adalah 89.67. Sehingga capaian kerjanya adalah 103.15% artinya sudah melebihi target yang ditetapkan.*
- f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	836	836	100%	100%	100%
Pidana	1240	1240	100%	100%	100%
Hukum	1250	1250	100%	100%	100%

Perdata	2739	2739	100%	100%	100%
---------	------	------	------	------	------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu
 Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	484	574	100%	84.32%	84.32%
Pidana Anak	7	7	100%	100%	100%
Perdata	324	324	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada triwulan I Tahun 2021, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 84.32%, 100% dan 100%.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
6	181	5.87%	3.31%	56.38%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hampir memenuhi target yang telah ditetapkan.

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	13	28	38.69%	46.42%	119%
Pidana Anak	2	2	66.66%	100%	151%
Perdata	65	89	37.89%	73.03%	192%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa, pidana anak dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 119%, 151% dan 192%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
0	0	100%	0	0

* Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo tidak ada realisasi penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada periode Triwulan I tahun 2021.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
281	281	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
5	241	15.91%	2.07%	13%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 13%.

Tangerang, 15 April 2021

Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



 Dr. Fanti Yanti Muhammad, SH, MH
NIP. 197309081994032003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan I Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
2	2	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
4	4	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 100%.

6. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	-	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 0%. Dikarenakan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan pada akhir Maret 2021.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	92.15%	96.96%	105.2%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 105.2%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	98.40%	98.96%	100.5%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 100.5%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2021)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000	Rp. 0	0%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 0%.

Tangerang, 15 April 2021
Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang




RINI SUMARNINGSIH, SH, MM
NIP. 196201061987032001

Laporan Triwulan II
(Januari – Juni)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan I tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	531	531	100%	100%	100%
Pidana Anak	2	2	100%	100%	100%
Perdata	626	626	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh bagian Kepaniteraan Pidana dan Perdata telah mencapai target yakni sebesar 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	1091	1598	80.34%	68.27%	84.97%
Pidana Anak	11	17	82.08%	64.7%	78.82%
Perdata	920	1642	73.74%	56.02%	75.96%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 84.97%, 78.82% dan 75.96% sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

- c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	1873	2022	97.33%	92.63%	95.17%
Kasasi	2001	2022	98.67%	98.96%	100.2%
PK	1922	2022	99.79 %	95.05%	95.25%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi dari target yang ditetapkan.

- d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
 Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Anak	1	11	7.14%	9.09%	127%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi telah melebihi target yang ditetapkan.

- e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – Juni 2021 adalah 91.98% sedangkan taget yang ditetapkan adalah 89.67. Sehingga capaian kerjanya adalah 102.5% artinya sudah melebihi target yang ditetapkan.*
- f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	1681	1681	100%	100%	100%
Pidana	2756	2756	100%	100%	100%
Hukum	3309	3309	100%	100%	100%

Perdata	5596	5596	100%	100%	100%
---------	------	------	------	------	------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu
Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	978	1090	100%	89.72%	89.72%
Pidana Anak	11	11	100%	100%	100%
Perdata	675	675	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada triwulan II Tahun 2021, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 89.72%, 100% dan 100%.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
13	352	5.87%	3.69%	62.86%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hampir memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 62.86%.

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	37	75	38.69%	49,33%	127%
Pidana Anak	19	19	66.66%	100%	150%
Perdata	65	89	37.89%	73.03%	192%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa, pidana anak dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 127%, 150% dan 192%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
0	0	100%	0	0

* Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo tidak ada realisasi penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada periode triwulan II tahun 2021.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
516	516	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
14	557	15.91%	2.51%	15.77%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 15.77%.

Tangerang, 12 Juli 2021
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



→ Dr. Tanti Yanti Muhammad, SH, MH
NIP. 197309081994032003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
9	9	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
13	13	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 100%.

6. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	-	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 0%. Dikarenakan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten belum ada pelaksanaannya sampai pada akhir Juni 2021.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	92,15%	93,83%	101,8%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 101,8%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	98,40%	95,10%	96,64%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 96,64%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2021)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000	Rp. 150.700.000	56,86%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Juni 2021 sebesar 56.86%.

Tangerang, 12 Juli 2021

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang



[Handwritten signature]

RINI SUMARNINGSIH, SH, MM
NIP. 196201061087032001

Laporan Triwulan III
(Januari – September)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	531	531	100%	100%	100%
Pidana Anak	2	2	100%	100%	100%
Perdata	626	626	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh bagian Kepaniteraan Pidana dan Perdata telah mencapai target yakni sebesar 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	1597	2120	80.34%	75.33%	93.76%
Pidana Anak	21	26	82.08%	80.76%	98.39%
Perdata	1511	2188	73.74%	69.05%	93.63%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 93.76%, 98.39% dan 93.63% sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

- c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	3023	3129	97.33%	96.61%	99.26%
Kasasi	2990	3129	98.67%	95.55%	96.83%
PK	3093	3129	99.79%	98.84%	99.04%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, kasasi dan PK telah hampir mencapai dari target yang ditetapkan.

- d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
 Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Anak	3	9	7.14%	3.33%	46.6%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi belum mencapai target yang ditetapkan.

- e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – September 2021 adalah 91.57% sedangkan target yang ditetapkan adalah 89.67. Sehingga capaian kinerjanya adalah 102.1% artinya sudah melebihi target yang ditetapkan.*
- f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	2255	2255	100%	100%	100%
Pidana	4019	4019	100%	100%	100%
Hukum	5159	5159	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu
 Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	1484	1610	100%	92.17%	92.17%
Pidana Anak	22	22	100%	100%	100%
Perdata	1053	1053	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada triwulan III Tahun 2021, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 92.17%, 100% dan 100%.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
28	495	5.87%	5.65%	96.25%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hampir memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 96.25%.

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	128	63	38.69%	49.21%	127.1%
Pidana Anak	37	37	66.66%	100%	150%
Perdata	235	181	37.89%	77%	203%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa, pidana anak dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 127%, 150% dan 203%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Sept	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
0	0	100%	0	0

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo tidak ada realisasi penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada periode triwulan III tahun 2021.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
741	741	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
21	941	15.91%	2.23%	14.01%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 14.01%.

Tangerang, 12 Oktober 2021

Mengetahui,

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



Dr. Yanti Yanti Muhammad, SH, MH
NIP. 197309081994032003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
10	10	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d September 2021 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
19	19	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d September 2021 sebesar 100%.

6. Meningkatkan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d September 2021 sebesar 100%. Dikarenakan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten pelaksanaannya pada awal Oktober 2021.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	92.15%	93.51%	101.4%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d September 2021 sebesar 101.4%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	98.40%	95.12%	96.66%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d September 2021 sebesar 96.66%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan III tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2021)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000	Rp. 217.445.000	82.05%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d September 2021 sebesar 82.05%.

Tangerang, 12 Oktober 2021
Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang



NINI SUMARNINGSIH, SH, MM
NIP. 196201061987032001

**Laporan Triwulan IV
(Januari – Desember)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



**Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id**

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	531	531	100%	100%	100%
Pidana anak	2	2	100%	100%	100%
Perdata	626	626	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana dan Perdata dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	2083	2648	80.34%	78.66%	97.90%
Pidana Anak	38	40	82.08%	95%	115%
Perdata	2233	2890	73.74%	77.26%	104.7%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 97.90%, 115% dan 104.7% sudah berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.

- c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Bandīng	2920	3250	97.33%	89.84%	92.30%
Kasasi	3108	3250	98.67%	95.63%	96.91%
PK	3109	3250	99.79%	95.66%	95.86%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum hampir mencapai target yang ditetapkan.

- d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
 Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	3	38	7.14%	7.89%	110.5%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi telah mencapai target yang ditetapkan.

- e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – Desember 2021 adalah 91.86%*, sedangkan target yang ditetapkan adalah 89.67. Sehingga capaian kerjanya adalah 102.4% artinya sudah melebihi target yang ditetapkan.
- f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	3165	3165	100%	100%	100%
Pidana	5591	5591	100%	100%	100%
Hukum	7584	7584	100%	100%	100%
Perdata	11.247	11.247	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu
 Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	2029	2164	100%	93.76%	93.76%
Pidana Anak	36	37	100%	97.29%	97.29%
Perdata	1483	1483	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan IV Tahun 2021, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93.76%, 97.29% dan 100%.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
36	670	5.87%	5.37%	91.48%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	139	206	38.69%	67.47%	174%
Pidana Anak	41	41	66.66%	100%	150%
Perdata	300	366	37.89%	81.96%	216%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 174%, 150% dan 216%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
0	0	100%	0	0

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo tidak ada realisasi penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada periode

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
1050	1050	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
28	1375	15.91%	2.03%	12.75%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 12.75%.

Tangerang, 13 Januari 2021

Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang


Dr. Taritri Yanti Muhammad, SH, MH
NIP. 197609081994032003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
12	12	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Desember 2021 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
21	21	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Desember 2021 sebesar 100%.

6. Meningkatkan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Desember 2021 sebesar 100%. Dikarenakan sudah ada Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten sejak bulan Januari sd Desember 2021.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	92.15%	93.50%	101.4%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Desember 2021 sebesar 101.4%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	98.40%	90.66%	92.13%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 92.13%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan IV tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2021)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000	Rp. 262.895.000	99.21%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Desember 2021 sebesar 99.21%.

Tangerang, 13 Januari 2022
Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang




RINI SUMARNINGSIH, SH, MM
NIP. 196201051987032001 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perdata -Pidana Biasa - Pidana Anak <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak <p>c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. </p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. </p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	<p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus $\times 100\%$</p> <p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p> <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaza</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). </p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$ Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	----------	-------------------------------------



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 /1128/KP.10.10/12/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 20019;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Mengingat : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN
2021
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun
2021 ;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjalankan
tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 7 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

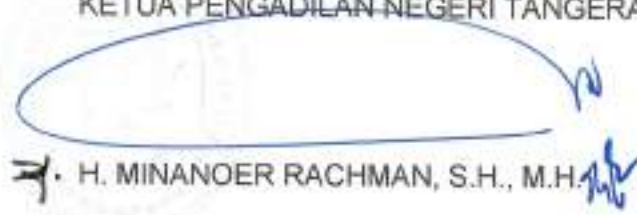
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor W29.U4/ 128 /KP.10.10/12/2021
Tanggal 22 Desember 2021

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. MINANOER RACHMAN, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	BARITA SINAGA, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	RINI SUMARNINGSIH, S.H,M.M	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	Dr. TANTRI YANTI M, S.H, M.H	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	DESSY HERLIANI, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	DENHAR, S.H, M.H	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	MARTHIN TURNIP, S.H, M.H	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Perkara
8	ENDANG PURWANINGSIH, S.H, M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	BAYU FITRIAS L BHASKARA, S.T, M.H	Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H RACHMAT BUDIYANTO	Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12	PRISKA RUFINA S, S.E	Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
13	ADHI FIRZIA MIHRAM	Staff Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.